

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN ETIKA (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)

Bayu Wisnu Pradana
Dwi Ratmono¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof.Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239.Phone : +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the proportion of independent members of the audit committee, the number of audit committee meetings, the size of the audit committee, the average tenure of audit committee members, and members of the audit committee with multiple-Directorship on ethics disclosure.

This study uses data time series in 2012, 2013 and 2014 annual reports of companies listed on the Stock Exchange. Purposive sampling chosen as the sampling method. The number of samples in this research are 248 companies. This study uses regression analysis.

The results showed that only the number of audit committee meetings are significant positive effect on the ethics disclosure. While the proportion of independent members of the audit committee, the audit committee size, the average tenure of members of the audit committee and member of the audit committee with multiple-Directorship does not significantly influence the ethics disclosure.

Keywords: (Audit Committee Characteristics, Ethics Disclosure, Good Corporate Governance)

PENDAHULUAN

Perusahaan yang berkelanjutan adalah salah satu prinsip dari perusahaan itu sendiri. Etika merupakan salah satu komponen penting pada pelaksanaan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan membuat kode etik sebagai bentuk penerapan etika pada pelaksanaan bisnis perusahaan. Penerapan etika pada perusahaan dapat menghindarkan perusahaan dari permasalahan dalam bisnisnya yang terkait dengan perilaku tidak etis. Tindakan kecurangan atau perilaku tidak etis dalam pelaksanaan bisnis perusahaan berakibat buruk pada keberlanjutan usaha perusahaan. Pada tahun 2001, terjadi kasus kebangkrutan perusahaan besar di Negara Amerika, yaitu Enron dan WorldCom yang berkaitan dengan adanya praktik bisnis dengan tindakan yang tidak etis. Praktik bisnis yang menggunakan tindakan tidak etis menjadi salah satu faktor terjadinya skandal perusahaan. Menurut Bealing dan Baker (2006), skandal perusahaan telah berdampak buruk pada banyak lembaga ekonomi antara lain pasar, investor, dan badan pembuat peraturan pelaporan bisnis yang melindungi kelompok-kelompok kepentingan seperti pelanggan, regulator, dan badan legislatif.

Salah satu cara dalam menanggapi masalah tindakan tidak etis dalam perusahaan adalah dengan perusahaan melakukan pengungkapan etika (*ethics disclosure*). Pengungkapan etika yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan dengan pembuatan kode etik perusahaan. Pengungkapan kode etik pada suatu perusahaan dimaksudkan untuk memberikan informasi bagaimana perusahaan menerapkan nilai-nilai yang dianut dalam menjalankan perusahaan. Pengungkapan etika yang dilakukan oleh manajemen akan terwujud secara baik bila terdapat pengawasan pada penerapannya yang merupakan salah satu aspek dari mekanisme *good corporate governance*. Perusahaan yang menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG) secara baik cenderung menghasilkan nilai perusahaan yang tinggi. Nilai perusahaan juga dapat ditingkatkan dengan melakukan peningkatan pengungkapan laporan sukarela oleh manajemen (Abbott dan Parker, 2000). Kasus skandal etika

¹ Corresponding author

yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan besar Amerika seperti Enron dan WorldCom menimbulkan peningkatan kesadaran akan pentingnya mekanisme *good corporate governance* (GCG) yang dilandasi oleh pengungkapan etika oleh perusahaan. Mekanisme GCG yang memastikan perusahaan menerapkan dan bertanggung jawab terhadap praktik kode etik adalah komite audit.

Peran komite audit dalam mekanisme GCG adalah subjek dari peningkatan kepentingan pemilik kepentingan (*stakeholder*) yaitu masyarakat (*public*) dan badan pembuat aturan (Abbott dan Parker, 2000). Sebagai salah satu bentuk pengawasan bahwa suatu perusahaan telah dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika serta menghindari adanya benturan kepentingan dan kecurangan maka dibentuklah suatu komite yaitu komite audit. Masalah mengenai GCG menjadi menarik perhatian terutama di Indonesia karena terjadinya krisis ekonomi di beberapa negara Asia termasuk Indonesia tahun 1997 dan 1998, yang berkembang menjadi krisis multi dimensi berkepanjangan (Kartika, 2009). Krisis tersebut menimbulkan dampak buruk pada perekonomian Indonesia.

Keberadaan komite audit di Indonesia diatur oleh BAPEPAM-LK dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-643/BL/2012 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan ini mencakup tentang jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, dan jumlah anggota komite audit independen. Pemberlakuan aturan atas karakteristik komite audit bertujuan agar meningkatkan efektifitas dan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Adanya pemberlakuan aturan pada komite audit diharapkan dapat meningkatkan mekanisme GCG perusahaan yang salah satunya dilakukan dengan cara melakukan peningkatan pengungkapan pada laporan tahunan (*annual report*).

Menurut Othman, dkk (2015), beberapa variabel dalam karakteristik komite audit memiliki pengaruh atas pengungkapan etika sukarela. *Tenure anggota* komite audit dan proporsi jumlah anggota komite audit dengan *multiple-directorship* berpengaruh signifikan atas pengungkapan etika bisnis perusahaan. Anggota komite audit yang memiliki *tenure* atau masa jabatan lebih lama cenderung memiliki kinerja dan keefektifan yang lebih tinggi dalam komite audit yang diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan etika. Sedangkan anggota komite audit dengan *multiple-directorship* memberikan dampak yang negatif atas keefektifan dan keefisienan dalam pengawasan terhadap pihak manajemen.

Menurut Umbing (2014), proporsi anggota komite audit dengan *multiple-directorship* tidak berpengaruh atas pengungkapan etika bisnis (PEB). Tidak adanya pengaruh dari proporsi anggota komite audit dengan *multiple-directorship* dikarenakan komitmen waktu yang dimiliki oleh komite audit rendah sehingga menyebabkan kinerjanya tidak maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Persons (2009) bahwa proporsi anggota komite audit dengan *multiple-directorship* tidak berpengaruh pada pengungkapan etika sukarela. Proporsi anggota komite audit independen, latar belakang pendidikan anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, dan ukuran komite audit merupakan karakteristik komite audit yang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan etika sukarela (Othman, dkk 2015). Tetapi, anggota komite audit independen memberikan dukungan terhadap SOX bahwa komite audit harus terpisah dari manajemen (Persons, 2009).

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan etika. Karakteristik komite audit yang diteliti adalah proporsi anggota komite audit independen, jumlah rapat komite audit, ukuran komite audit, rata-rata masa jabatan anggota komite audit dan proporsi anggota komite audit dengan *multiple-directorship*.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Landasan Teori Penelitian

Teori agensi menjelaskan hubungan antara manajemen (agen) dan pemilik (principal). Manajemen bertindak sebagai pengelola perusahaan yang bekerja atas kepentingan pemilik. Manajemen akan menerima imbalan dari pemilik atas tugasnya tersebut. Hubungan manajemen dan pemilik terdapat kewajiban bagi masing masing pihak. Manajemen berkewajiban melaporkan semua aktivitas perusahaan kepada pemilik. Pelaporan dari manajemen bersifat terbuka kepada pemilik. Di sisi lain, pemilik memberikan insentif atau imbalan atas kinerja manajemen. Tindakan pihak pemilik sebagai prinsipal yang mengetahui haknya untuk memperoleh informasi perusahaan baik *mandatory* atau *voluntary* dapat mengurangi potensi asimetri informasi.

Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan dimana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Teori egoisme menganggap bahwa setiap tindakan seseorang pasti bertujuan (motivasi) untuk kepentingan dan memajukan diri pribadinya apapun alasan dan ucapannya. Teori utilitarianisme yang menilai bahwa baik-buruknya suatu tindakan dinilai berdasarkan manfaat, tujuan, atau akibat dari tindakan itu kepada sebanyak mungkin orang. Etika berkaitan dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai yang akan menuntun seseorang pada perilaku etis pada segala situasi termasuk dalam kegiatan bisnis.

Komite Audit

Perusahaan terdiri dari pihak pemilik (prinsipal) dan pihak manajemen (agen). Pemilik memerlukan pengawasan terhadap aktivitas manajemen perusahaan. Dewan komisaris merupakan wakil dari pemilik dalam menjaga kepentingannya. Untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang secara efektif, maka dewan komisaris membentuk komite-komite sesuai kebutuhan perusahaan dan peraturan yang berlaku. Komite Audit melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris. Karakteristik komite audit adalah proporsi anggota komite audit independen, jumlah rapat komite audit, ukuran komite audit, rata-rata masa jabatan anggota komite audit, anggota komite audit dengan *multiple-directorship*.

PERUMUSAN HIPOTESIS

Hubungan Proporsi Anggota Komite Audit Independen terhadap Pengungkapan Etika

Komite audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Tingkat proporsi anggota yang independen mempengaruhi kualitas kinerja komite audit. Komite Audit dinyatakan memiliki kinerja tinggi yaitu ketika anggota komite audit bersifat independen yang mana mengakibatkan terjadinya keefektifan dalam menjaga kredibilitas pengungkapan laporan keuangan.

H1: Proporsi anggota komite audit independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika

Hubungan Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Etika

Rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota dan keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap anggota menyalurkan pendapat dan ide-ide melalui rapat dalam rangka pengambilan keputusan. Rapat menjadi salah satu indikator agenda dari komite audit yang memiliki kinerja baik.

H2: Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika

Hubungan Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Etika

Setiap anggota komite audit memiliki pemikiran dan pendapat masing-masing terkait pengambilan suatu keputusan. Sehingga semakin banyak anggota komite audit akan berimbang pada semakin bertambah pendapat dalam komite audit.

H3: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika

Hubungan Rata-rata Masa Jabatan Anggota Komite Audit terhadap Pengungkapan Etika

Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Anggota komite audit memperoleh pengalaman dan penambahan wawasan terkait dengan bertambahnya masa jabatan anggota komite audit.

H4: Rata-rata masa jabatan anggota komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika

Hubungan Anggota Komite Audit dengan Multi-directorship terhadap Pengungkapan Etika

Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan (KNKG, 2006). Anggota komite audit yang memiliki beberapa jabatan pada perusahaan lain memerlukan waktu tambahan, perhatian dan usaha lebih dalam menjalankan pengawasan dan mengarah pada berkurangnya pengungkapan etika.

H5: Anggota komite audit dengan *multi-directorship* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan etika

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah karakteristik komite audit yang terdiri atas proporsi anggota komite audit independen, jumlah rapat komite audit, ukuran komite audit, rata-rata masa jabatan anggota komite audit, dan anggota komite audit dengan *multiple-directorship*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan etika. Etika merupakan acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Pengukuran variabel ini menggunakan 18 aspek pengungkapan etika yang diadaptasi dari Persons (2009). Setiap perusahaan akan dihitung jumlah aspek pengungkapan etika yang dilakukan dan kemudian dibagi dengan total 18 aspek pengungkapan etika.

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran

No	Variabel	Pengukuran
1	Proporsi Anggota Komite Audit Independen	$\frac{\text{Anggota Komite Audit Independen}}{\text{Ukuran Komite Audit}}$
2	Jumlah Rapat Komite Audit	\sum Rapat Komite Audit dalam 1 Tahun
3	Ukuran Komite Audit	\sum Anggota Komite Audit
4	Rata-rata Masa Jabatan Anggota Komite Audit	$\frac{\text{Jumlah Masa Jabatan Anggota Komite Audit}}{\text{Ukuran Komite Audit}}$
5	Anggota Komite Audit dengan <i>Multiple-directorship</i>	\sum Anggota komite audit yang memiliki jabatan pada tingkat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi di perusahaan lain
6	Pengungkapan Etika	$\frac{\text{Jumlah Aspek Pengungkapan Etika yang Diungkapkan}}{\text{Total 18 Aspek Pengungkapan Etika}}$

Sumber: Data tahun 2015, diolah

Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2012-2014. Penggunaan data tahun 2012-2014 karena pada tahun tersebut menggambarkan kondisi yang relatif baru di pasar modal Indonesia. Metode pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan dan melakukan pengungkapan etika tahun 2012-2014 dalam *corporate governance*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa laporan tahunan (*annual report*) tahun 2012-2014. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode arsip (dokumentasi). Basis data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) perusahaan.

Metode Analisis

Uji Asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum uji terhadap hipotesis dilakukan. Untuk pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sebagai prasyarat dilakukan regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Ghozali, 2011). Pengujian asumsi klasik meliputi:

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Nilai *tolerance* atau *variance inflation factors* (VIF) dapat digunakan untuk mendeteksi gejala multikolinieritas. Multikolinieritas terjadi apabila nilai

tolerance kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10. Jadi dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Scatterplot* dan uji *Glejser*. Jika pada grafik *Scatterplot* tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika hasil uji *Glejser* menunjukkan nilai probabilitas signifikansi lebih dari 0, 05 maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menguji apakah residual dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Cara yang digunakan untuk mengetahui normalitas residual dalam model regresi adalah dengan melihat grafik histogram, uji statistic non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan normal *probability plot*.

Suatu model dikatakan memiliki distribusi normal jika pola grafik histogram tidak menceng ke kanan ataupun kiri. Data yang memiliki distribusi normal menunjukkan, grafik probabilitas yang normal dan dapat terlihat dari titik-titik yang penyebarannya mendekati garis diagonal. Pada uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) data residual yang terdistribusi normal akan menghasilkan tingkat signifikansi diatas 5 persen (Ghozali, 2009).

Uji Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan sebagai metode analisis karena dapat mengukur tingkat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan memperlihatkan arah hubungan yang ada diantara dua variabel tersebut. Analisis regresi digunakan karena variabel independen yang memengaruhi variabel dependen berjumlah lebih dari 1, selain itu data terdiri dari berbagai perusahaan yang berbeda.

PE	: Pengungkapan etika
INDAUD	: Proporsi anggota komite audit yang independen
AUDMET	: Jumlah rapat komite audit dalam setahun
AUDSIZE	: Ukuran komite audit
AUDTEN	: Rata- rata masa jabatan anggota komite audit
DIRSHIP	: anggota komite audit dengan <i>multiple-directorship</i>

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam model. Nilai koefisien determinasi akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel independen, meskipun variabel tersebut sebenarnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011). Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig. < 0, 05), maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah tepat.

2. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig. > 0, 05), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak tepat.

Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS. Jika nilai probabilitas signifikansi t lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen tidak signifikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskripsi Sampel

Tabel 4.1
Populasi dan Sampel

	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Jumlah Emiten Non-keuangan	299	384	384
Jumlah Emiten yang Tidak Mengungkapkan Etika	230	299	290
Jumlah Emiten yang Mengungkapkan Etika	69	85	94
Jumlah Total Sampel	69 + 85 + 94 =248		

Sumber: data 2015 diolah

Penelitian ini mengukur pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan etika pada perusahaan non-keuangan yang tercatat pada bursa efek Indonesia, lebih spesifiknya adalah perusahaan non-keuangan pada tahun 2012, 2013, dan 2014. Populasi penelitian ini sejumlah 1067 yang diperoleh dari perusahaan non-keuangan tahun 2012, 2013, dan 2014 yang berturut-turut sejumlah 299, 384, dan 384 perusahaan.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah Sampel	Rata-rata	Standar Deviasi	Nilai Minimal	Nilai Maksimal
INAUD	248	0,9643	0,20662	0,33	1,00
AUDMET	248	7,7298	6,47039	1,00	48,00
AUDSIZE	248	3,1935	0,57163	2,00	6,00
AUDTEN	248	3,1510	2,70503	0,08	13,00
DIRSHIP	248	1,1935	0,94528	0,00	4,00
PE	248	0,3112	0,17856	0,06	0,83

Sumber: Data tahun 2015, diolah

Proporsi jumlah anggota komite audit independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,9643 yang menunjukkan bahwa perbandingan jumlah anggota komite audit yang independen terhadap ukuran komite audit rata-rata sebesar 96%. Jumlah rapat komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 7,7298 yang menunjukkan bahwa rata-rata rapat yang dilakukan komite audit dalam satu tahun sebanyak 7 kali. Ukuran komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 3,1935 dengan standar deviasi sebesar 0,57163 yang menunjukkan bahwa rata-rata komite audit di perusahaan beranggotakan sebanyak 3 orang. Rata-rata masa jabatan anggota komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 3,1510 yang menunjukkan bahwa anggota komite audit bermasa jabatan 3,15 tahun atau 37 bulan. Anggota komite audit dengan *multiple-directorship* memiliki nilai rata-rata sebesar 1,1935 yang menunjukkan bahwa rata-rata komite audit beranggotakan 1 orang dengan status *multiple-directorship*. Pengungkapan Etika memiliki rata-rata sebesar 0,3112 atau 31,12% yang menunjukkan bahwa rata-rata aspek yang diungkapkan emiten sebanyak 5,6016 ($0,3112 \times 18$ aspek) yang dibulatkan menjadi 5 aspek.

Tabel 4.4
Jumlah Emiten Non-keuangan Pengungkap Etika Tahun 2012-2014

No	Sektor	2012	2013	2014	Jumlah Emiten
1	Pertanian	1	1	2	4
2	Pertambangan	10	14	13	37
3	Industri Dasar dan Kimia	11	12	15	38
4	Aneka Industri	5	7	7	19
5	Industri Barang Konsumsi	5	3	4	12
6	Properti dan Real Estate	8	12	17	37
7	Infrastruktur, utilitas dan Transportasi	5	9	9	23
8	Keuangan	-	-	-	-
9	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	24	27	27	78
Jumlah					248

Sumber: Data tahun 2015, diolah

Berdasarkan Tabel 4.4, sektor perdagangan, jasa dan investasi adalah sektor dengan jumlah emiten pengungkap etika terbanyak selama tahun 2012-2014 dengan jumlah 78 emiten. Sektor pertanian merupakan sektor dengan emiten pengungkap etika paling sedikit selama tahun 2012-2014 sebanyak 4 emiten.

Tabel 4.5
Jumlah Aspek Pengungkapan Etika yang Diungkapkan

No	Aspek Pengungkapan	Jumlah Pengungkapan (%)
1	Apakah perusahaan memiliki etika perusahaan atau petugas kepatuhan?	85,48%
2	Apakah perusahaan memiliki kode perilaku bisnis dan etika bisnis tertulis?	79,84%
3	Benturan kepentingan antar individu dan antar hubungan profesional.	54,84%
4	Apakah perusahaan menyediakan pelatihan etika untuk karyawan atau mensyaratkan karyawan untuk menandatangani surat pernyataan bahwa karyawan telah membaca dan akan mematuhi kode etik perusahaan?	53,23%
5	Kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku termasuk dikriminasi, pelecehan, lingkungan dan hak asasi manusia.	51,21%
6	Apakah perusahaan mempertimbangkan etika dalam mempekerjakan direktur atau eksekutif?	37,90%
7	Pengelolaan informasi rahasia.	37,50%
8	Penggunaan aset perusahaan.	29,03%
9	Tinggakan disiplin terhadap pelanggaran kode.	26,21%
10	Pemeliharaan dari catatan perusahaan yang akurat.	18,15%
11	<i>Insider trading</i> dari saham perusahaan.	16,94%
12	Hubungan dengan masyarakat.	16,53%
13	Pelaporan keluhan akuntansi dan perilaku ilegal/ tidak etis.	15,32%
14	Penyuapan komersial.	14,92%
15	Persaingan dan adil.	13,71%
16	Anti-nepotisme	6,05%
17	Apakah perusahaan memiliki komite khusus dari dewan direksi yang memiliki tanggung jawab pengawasan terkait etika?	3,23%
18	Apakah perusahaan menghubungkan antara kompensasi untuk eksekutif dengan perilaku etik dari perusahaan?	0,00%

Sumber: Data tahun 2015, diolah

Tabel 4.5 menunjukkan daftar pengungkapan etika dari jumlah presentase terbesar sampai terkecil. Aspek pengungkapan yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan adalah aspek apakah perusahaan memiliki etika perusahaan atau petugas kepatuhan yaitu dengan presentase 85,48% (212 dari 248 perusahaan) mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki etika perusahaan

atau petugas kepatuhan. Sementara itu, terdapat presentase sebesar 0,00% yangmana merupakan presentase terkecil pada aspek apakah perusahaan menghubungkan antara kompensasi untuk eksekutif dengan perilaku etik dari perusahaan, dimana tidak terdapat perusahaan yang mengungkapkan melakukan pemberian kompensasi pada jajaran eksekutif berdasarkan kode etik perusahaan.

Pengujian Hipotesis

Dari hasil pengujian terhadap asumsi klasik, diperoleh penelitian telah memenuhi asumsi *heteroskedastisitas*, *multikolinieritas*, dan *normalitas*. Maka setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya akan diuji koefisien untuk menguji hipotesis yang ada pada penelitian ini.

Koefisien Determinasi

Tabel 4.11
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,335 ^a	0,112	0,094	0,15405

a. Predictors: (Constant), TDIRSHIP, TAUDTEN, TINAUD, TAUDMET, TAUDSIZE

b. Dependent Variable: TPE

Sumber: Data tahun 2015, diolah

Dari tabel 4.11 terlihat bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,094 atau 9,4%, hal tersebut memiliki arti bahwa 9,4% nilai Pengungkapan Etika yang diungkapkan perusahaan dapat dijelaskan dari variasi model proporsi jumlah anggota komite audit yang independen, jumlah rapat komite audit, ukuran komite audit, rata-rata masa jabatan anggota komite audit dan jumlah anggota komite audit dengan *multiple-directorship*.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 4.12
Uji Statistik F

Model		Annova ^b				
		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	0,725	5	0.145	6,114	0.000 ^b
	Residual	5,743	242	0.024		
	Total	6.468	247			

Dependent Variable: TPE

Predictors: (Constant), TDIRSHIP, TAUDTEN, TINAUD, TAUDMET, TAUDSIZE

Sumber: Data tahun 2015, diolah

Hasil uji statistik tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 6,114 dan memiliki tingkat signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal ini memiliki arti bahwa variabel proporsi anggota komite audit independen, jumlah rapat komite audit, ukuran komite audit, rata – rata masa jabatan anggota komite audit, dan anggota komite audit dengan *multiple-directorship* memiliki pengaruh dan signifikan terhadap variabel pengungkapan etika.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 4.13
Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,349	0,231		1,514	0,131
	INAUD	-0,129	0,165	-0,049	-0,779	0,437
	AUDMET	0,050	0,011	0,284	4,615	0,000
	AUDSIZE	0,113	0,072	0,100	1,575	0,117
	AUDTEN	-0,004	0,014	-0,016	-0,268	0,789
	DIRSHIP	-0,017	0,016	-0,063	-1,042	0,298

Sumber: Data tahun 2015, diolah

Berdasarkan tabel 4.13, variabel proporsi anggota komite audit memiliki tingkat signifikansi $0,437 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa proporsi anggota komite audit independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan etika. Hipotesis 1 ditolak. Variabel jumlah rapat komite audit memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan etika. H2 tidak dapat ditolak. Variabel ukuran komite audit memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,117 > 0,05$. Hal ini menunjukkan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan etika. H3 ditolak. Variabel rata-rata masa jabatan anggota komite audit memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,789 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masa jabatan anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan etika. H4 ditolak. Variabel anggota komite audit dengan *multiple-directorship* memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,298 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa anggota komite audit dengan *multiple-directorship* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan etika. H5 ditolak.

Proporsi anggota komite audit independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan etika.

Hipotesis 1 menyatakan bahwa proporsi anggota komite audit independen dengan jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika. Berdasarkan hasil regresi, proporsi anggota komite audit independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan etika sehingga hipotesis pertama ditolak. Berdasarkan peraturan Bapepam no 643/BL/2012, komite audit seharusnya terdiri atas sekurang-kurangnya dari satu ketua dewan komisaris independen dan dua orang anggota independen. Emiten yang beranggotakan kurang dari 3 orang anggota independen menjadikan komite audit berjalan kurang efektif atas pengawasan dan pelaksanaan pengungkapan etika.

Menurut Effendi (2005) dalam Umbing (2014) keberadaan Komite Audit di perusahaan sebagian besar hanya sekedar memenuhi tuntutan regulator (Bapepam & BEI) dan hal ini dapat diketahui bahwa yang ditunjuk sebagai anggota Komite Audit di perusahaan publik banyak yang belum memenuhi kualitas dan kompetensi seperti yang diharapkan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Othman, dkk (2015) yang menyatakan bahwa komite audit yang independen tidak memiliki pengaruh terhadap penungkapan etika.

Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika. Berdasarkan hasil pengujian regresi, jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika. Sehingga hipotesis 2 tidak dapat ditolak atau diterima.

Rapat diharapkan dapat menghasikan dan menentukan pengambilan keputusan iantara anggota. Jumlah rapat yang banyak berarti banyak ide-ide dan keputusan yang telah terakomodir dari setiap anggota. Hal ini berarti aktivitas komite audit berjalan dengan baik.

Adanya pengaruh positif jumlah rapat mengindikasikan bahwa Komite Audit menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Persons (2009).

Komite audit melakukan rapat minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun menjadikan kondusif untuk pengungkapan etika.

Ukuran komite audit tidak berpengaruh pada pengungkapan etika

Hipotesis 3 menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika. Hipotesis ketiga di tolak. Berdasarkan keputusan ketua Bapepam no 643/BL/2012, komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota. Kurangnya anggota komite audit dari tiga orang menjadikan komite audit berjalan tidak efisien dalam menjalankan pengawasan dan pelaksanaan pengungkapan etika.

Menurut Lin, dkk (2008); Steiner (1972) dan Hackman (1990) menyatakan bahwa semakin besar ukuran komite audit akan mengarahkan pada debat yang tidak diperlukan dan penundaan dalam pengambilan keputusan karena komunikasi dan proses pembuatan keputusan yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ukuran komite audit kecil atau besar, itu tidak menentukan apakah komite melakukan pengungkapan tentang etika dalam perusahaan. Hal Ini mungkin terikat pada keputusan dan pengaruh dari dewan direksi untuk membuat pengungkapan tersebut atau tidak (Othman, dkk 2015). Penelitian ini tidak sesuai dengan Persons (2009) bahwa ukuran Komite Audit harus lebih dari tiga anggota.

Rata-rata masa jabatan anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan etika.

Hipotesis 4 menyatakan bahwa rata-rata masa jabatan anggota komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika. Hipotesis keempat ditolak. Dewan Komisaris memiliki wewenang dalam memilih, memntukan, dan memberhentikan anggota komite audit. Anggota komite audit dapat diberhentikan sebelum mencapai masa tugas yang ditetapkan. Pergantian anggota komite audit suatu emiten dapat mencapai tiga kali pergantian dalam satu tahun. Hal ini berakibat pada tingginya rotasi pergantian anggota komite audit dan minimnya jumlah pengalaman yang diperoleh. Masa jabatan Komite Audit tidak mempengaruhi kemampuan anggota dalam melakukan tugas pengawasan. Penelitian ini sejalan dengan persons (2009) menyatakan bahwa *tenure* komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan etika.

Anggota komite audit dengan *multiple-directorship* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan etika

Hipotesis kelima menyatakan bahwa anggota komite audit dengan *multiple-directorship* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan etika. Berdasarkan hasil regresi, tingkat signifikansi berada diatas level 0, 05 yang menunjukkan anggota komite audit dengan *multiple-directorship* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan etika. Sehingga hipotesis kelima di tolak.

Anggota komite audit dengan *multiple-directorship* memiliki tugas yang banyak pada lebih dari satu perusahaan. Penelitian Sharma dan Iselin (2006) dalam Umbing (2014) menyebutkan bahwa Komite Audit yang memiliki terlalu banyak posisi penting diluar perusahaan dapat membuat *overcommitted* karena terlalu sibuk. Anggota komite audit dengan *multi-directorship* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang mana tidak menguntungkan atau merugikan (Latif, dkk 2013). Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Persons (2009) yang menyatakan bahwa proporsi anggota komite audit dengan *multiple-directorship* tidak berpengaruh terhadap *voluntary ethics disclosures*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data, perusahaan telah membentuk komite audit untuk menunjang terlaksananya *good corporate governance* agar perusahaan mampu menjalankan bisnis secara berkesinambungan. Sebagai tugas komite audit dalam mengawasi kinerja perusahaan, komite audit memiliki wewenang dalam menjalankan tercapainya penerapan kode etik pada bisnis perusahaan. Sehingga kualitas dari komite audit menentukan penerapan sekaligus pengungkapan etika perusahaan. Setelah lolos uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas, penelitian ini memberikan hasil bahwa proporsi anggota komite audit yang independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan etika, jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan etika, ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan etika, rata-rata masa jabatan anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan etika, dan anggota komite audit dengan *multiple-directorship* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan etika. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian belum menggunakan data *annual report* tahun 2015 sebagai sumber data penelitian. Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menggunakan sumber data tahun paling relevan dalam penelitian mendatang, khususnya dalam penelitian ini adalah *annual report* tahun 2015.

REFERENSI

- Abbott, L.J dan Susan Parker.2000."Auditor Selection and Audit Committee characteristics" dalam *A Journal of Practice and Theory*, Vol. 19, No. 2, Hal 47-65
- Bealing, W.E. dan Richard L. Baker.2006."The Sarbanes-oxley Act: Have We Seen It All Before?" dalam *The Journal of Business and Economic Studies*, Vol. 12, No. 2, Hal 1-10
- Ghozali, Imam.2011.Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kartika, I. 2009. "Corporate Governance pada Perusahaan Keluarga dan Manajemen laba: Perspektif Teori Keagenan", *Disertasi tidak Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 200. Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia*.
- Latif, Rohaida Abdul dkk. 2013. "Multiple Directorships, Board Characteristics and Firm Performance in Malaysia" , Universiti Utara Malaysia
- Li, Jing dkk. 2008. "Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK Firms dalam *Accounting and Research Business*, Vol. 38 No. 2 Hal. 137-159.
- Othman, Rohana dkk..2015."Influence and Audit Committee Characteristics on Voluntary Ethics Disclosure" dalam *Social and Behavioral Sciences*, No. 145, Hal. 330-342
- Umbing, Golda B.2014.Karakteristik Komite Audit dan Pengungkapan Etika Bisnis.Skripsi Sarjana Program S1UNS: Tidak Diterbitkan
- Persons, O.S.2009."Audit Committee Characteristics and Earlier Voluntary Disclosure among Fraud and No-Fraud Firms" dalam *International Journal of Disclosure and Governance*, Vol. 6, No. 4, Hal.284-297
- 2011."Characteristics and Financial Performance of no-ethics-code firms" dalam *Journal of Academic and Business Ethics*, Hal. 1-14